Enam Kementerian Tandatangan Mou Dukung Pelaksanaan Urusan Transmi-grasi

Realitarakyat.com – Transmigrasi merupakan upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berinisiatif membuat "Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi" bersama lintas kementerian/lembagai terkait.

Sekretaris Kemenko PMK Y.B Satya Sananugraha menyampaikan, kesepakatan bersama ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian yang didokumentasikan untuk dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan program transmigrasi.

"Kesepakatan ini dapat dijadikan rujukan kedepan dalam merumuskan, menyelesaikan, dan mengendalikan kebijakan terkait transmigrasi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Satya di Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Lebih lanjut, Sesmenko mengatakan, ditandatanganinya kesepakatan bersama yang merupakan regulasi sementara ini dikarenakan belum terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren (RPP PUPK) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Tahun 2018, Kemenko PMK diamanatkan merumuskan 8 bidang urusan pemerintahan konkuren dan semua telah diselesaikan dengan baik. RPP PUPK tersebut adalah regulasi yang penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya termasuk bidang transmigrasi," jelasnya.

Adapun kesepakatan bersama tentang transmigrasi ini, lanjut Satya, adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk terus memacu pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

"Diharapkan, pelaksanaan urusan transmigrasi ke depan dapat bersinergi dan kolaboratif, mewujudkan penyelenggaraan transmigrasi yang fokus pada: peningkatan SDM, tata kelola kependudukan, pembangunan infrastruktur, penyerdehanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi masyarakat," tuturnya.

Sebagai informasi, Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi ini resmi ditandatangani oleh enam perwakilan kementerian yang berkepentingan dalam pelaksanaan urusan transmigrasi.

Adapun keenam pihak yang menandatangani kesepakatan bersama tersebut yaitu, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggualangan Bencana Kemenko PMK Sudirman; Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT Rr. Aisyah Gamawati; Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Yuli Harsono.

Selanjutnya, ada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto; Sesdirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri; dan Direktur Regional 2 Perencanaan Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (Din)